



Available online at SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal Website:

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK>

SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (2), 2015, 117-124

SISTEM POLITIK INDONESIA PASCA REFORMASI

Endang Komara

STKIP Pasundan

Email: endang_komara@yahoo.co.id

Naskah diterima : 28 September 2015, direvisi : 21 Oktober 2015, disetujui : 3 Desember 2015

Abstract

This article was written with the purpose to provide analysis of the Indonesian political system after the reform. As we know that the political system is often regarded as the allocation of values developed in the midst of society and every citizen appreciate them as ways of life. Appreciation of the value in the middle of the community is an achievement that fought to be obtained. Efforts made by doing internal intergenerational mobility of the political community to achieve the degree of political stability. Post-reform, the political system for the better, in which the role of the people more real in terms of repositioning the political system, from the selection of members of DPR / DPRD, DPD member elections, up to the local elections directly. The distribution of power is already at a level that means, it's just that people in the region do not yet have the ability to understand that the distribution of power is an opportunity to develop the region. In contrast, the distribution of power in the area it gave birth to the corrupt spirit ingrained in people's lives.

Keywords: political system; the allocation of value; internal intergenerational mobility; the repositioning of the political system; the distribution of power

Abstrak

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan analisis tentang sistem politik Indonesia pasca reformasi. Sebagaimana diketahui bahwa sistem politik sering dianggap sebagai alokasi nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan setiap warga masyarakat menghargainya sebagai ways of life. Penghargaan terhadap nilai di tengah-tengah masyarakat adalah sebuah prestasi yang diperjuangkan untuk dapat diperoleh. Upaya yang ditempuh dengan melakukan mobilitas intergenerasi internal dari komunitas politik untuk mencapai tingkat stabilitas politik. Pasca reformasi, sistem politik menjadi lebih baik, di mana peranan rakyat lebih nyata dalam hal reposisi sistem politik, mulai dari pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan anggota DPD, sampai dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Distribusi kekuasaan sudah pada tingkat yang berarti, hanya saja rakyat di daerah belum memiliki kemampuan untuk memahami bahwa distribusi kekuasaan merupakan kesempatan untuk membangun daerah. Sebaliknya, distribusi kekuasaan yang ada di daerah justru melahirkan semangat korup yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: sistem politik; alokasi nilai; mobilitas intergenerasi internal; reposisi sistem politik; distribusi kekuasaan

Pengutipan: Komara, E. (2015). *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 2015, 117-124. doi:10.15408/sd.v2i2.2814.

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814>

A. Pendahuluan

Beberapa negara di dunia telah mengalami perubahan setelah menempuh perjalanan panjang, bahkan beberapa di antaranya mengalami perubahan dalam waktu tempuh yang relatif pendek. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan tuntutan kepentingan berbagai pihak. Perubahan itu sendiri bukanlah suatu ancaman yang berbahaya, bilamana dalam pertimbangannya disikapi dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari sistem politik yang sudah berjalan sebelumnya. Dalam konteks ini perubahan berarti menciptakan kondisi yang lebih baik. Bisa saja perubahan dapat terjadi lebih buruk dari yang diinginkan, sebagai contoh yang terjadi di Yugoslavia dan negara-negara Balkan. Runtuhnya Uni Sovyet membawa bencana politik bagi negara-negara Balkan dengan berbagai krisis politik yang melanda karena kemampuan sistem politik yang rapuh, sementara tekanan politik begitu kuat sehingga tidak mampu membendung kuatnya arus tekanan terhadap sistem politik yang ada.

Kemampuan sistem politik yang masuk ke dalam proses perubahan sistem merupakan suatu fakta, bahwa kemampuan untuk terus bertahan dengan sistem politik yang ada merupakan sebuah keniscayaan. Tekanan terhadap sistem politik dapat saja disebabkan oleh perubahan yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Sebagai bagian dari sistem yang luas, sistem politik Indonesia akan selalu mendapat pengaruh dari sistem politik di luar negeri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh suatu tuntutan terhadap perubahan, tetapi yang paling penting adalah kemampuan dari sistem politik itu sendiri dalam menjawab dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik. Persoalan biasanya terletak pada kekuatan dari suatu sistem politik untuk mengatasi berbagai desakan dan tuntutan terhadap perubahan yang kurang memadai.

Suatu sistem politik yang kuat dapat menghadapi berbagai tekanan politik, baik yang muncul dari sistem politik itu sendiri maupun tekanan yang datang dari luar sistem

politik tersebut. Tekanan terhadap sistem politik akan berjalan terus-menerus, dari suatu periode kepada periode berikutnya. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik terbuka akan banyak mendapat pengaruh dan harus mampu mengikuti irama perubahan. Sistem politik di China yang sebelumnya sangat tertutup sekarang berusaha membuka diri kendatipun terkesan sangat hati-hati dan sedikit demi sedikit. Kemampuan China dalam menata sistem politiknya dapat dijadikan sebagai model yang baik, sehingga lebih memperhatikan sistem politik yang ada di dalam negeri. Walhasil China dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem politik yang terjadi di luar negeri. Pada sisi yang lain, sistem politik yang ada di Amerika Serikat selalu berusaha untuk memberikan warna ideologi terhadap negara yang lainnya. Setiap negara lain yang berbeda keinginan dengan Amerika Serikat selalu dianggap tidak demokratis menurut pandangan Amerika Serikat. Sebagai contoh, pemilu yang dilaksanakan di Iran dengan memilih presiden secara langsung, demikian juga kemenangan Hamas dalam pemilu di Palestina dianggap tidak demokratis karena Amerika Serikat menggunakan cara pandang menurut kepentingan negaranya sendiri. Akibatnya proses demokratis yang terjadi di dua negara tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan dunia, tidak lain karena kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina dan kemenangan Mahmud Ahmad Dinejad dalam pemilu Presiden Iran yang tidak dikehendaki oleh Amerika Serikat.

Kekuatan sistem politik yang ada di suatu negara dapat diangkat melalui kekuatan sendiri dengan cara menggali potensi yang ada pada negara tersebut. Kemampuan internal sistem politik berguna untuk membentengi diri, baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan yang datang dari dalam maupun dari luar mempunyai kekuatan yang sama, karena itu diperlukan kemampuan sistem politik untuk mempertahankan dirinya. Dalam hal ini Juliansyah mengatakan bahwa tekanan yang datang dari dalam negeri biasanya lebih pada perubahan yang diinginkan oleh warga masyarakat untuk memenuhi keinginan dan tuntutan yang lebih baik, akan tetapi membawa

dampak negatif bilamana perubahan tersebut tidak memiliki arah yang jelas terhadap perubahan yang diinginkan.¹

Berdasarkan pendapat di atas tampak jelas bahwa tekanan dari dalam negeri lebih disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencapai perubahan, sementara tekanan dari luar negeri lebih mengarah pada kepentingan negara asing lengkap dengan agenda perubahan sesuai dengan kepentingan negara asing yang membawa agenda perubahan tersebut.

B. Pembahasan

1. Sistem Politik

David Easton adalah salah satu ilmuwan yang telah berupaya membangun ilmu politik yang sistematis melalui dua tahap. *Pertama*, melalui tulisan ilmiahnya "*The Political System*" ia menyatakan betapa perlunya suatu teori umum dalam ilmu politik.² *Kedua*, dalam tulisan ilmiah lainnya "*A Framework for Political Analysis*" dan "*A System Analysis of Political Life*" ia mulai memperkenalkan konsep serta mencari konsep yang mendukung tulisan sebelumnya, untuk kemudian mencoba mengaplikasikan ke dalam kegiatan politik yang konkret atau praktis.³ Dalam hal ini Easton telah menggariskan kerangka berpikir dasar untuk mengkaji sistem politik. Kerangka pikir Easton bersifat adaptif dan fleksibel, karena itu dapat digunakan oleh aneka struktur masyarakat maupun politik. Teori Easton tersebut dimungkinkan dapat diaplikasikan secara improvisasi oleh para penggunaannya dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik.

Easton menafsirkan istilah politik sebagai "proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif". Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai dua tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik. Namun, proses alokasi nilai ini tidaklah

dilakukan secara sembarang atau oleh siapa saja, melainkan oleh lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk itu.

Sementara itu, Easton menyatakan ada 4 (empat) asumsi yang mendasari bangunan pemikirannya yang bersifat umum dalam mengkaji suatu sistem politik sebagai berikut. *Pertama*, ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi atau bangunan yang sistematis untuk mensistematisasikan (menyusun) fakta atau data yang ditemukan. *Kedua*, para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan (sistem), bukan parsial atau bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. *Ketiga*, riset sistem politik terdiri atas dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografi), lingkungan organis nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi, dan reaksinya). *Keempat*, sistem politik harus dianggap berada dalam suatu *disequilibrium* (ketidakseimbangan).⁴

Dari penjelasan di atas, maka asumsi yang dikemukakan Easton dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut. *Pertama*, perlunya membangun suatu kerangka sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. *Kedua*, perlunya memperjelas menyangkut konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik. *Ketiga*, perlunya memperjelas tentang lembaga-lembaga apa saja yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan nilai di tengah masyarakat. *Keempat*, perlunya pemahaman bahwa sistem politik itu merupakan gambaran keseluruhan (komprehensif), sehingga tidak dapat dikaji secara parsial. Misalnya, kita tidak hanya mengkaji lembaga legislatif saja tanpa mengaitkannya dengan peran lembaga eksekutif dalam melakukan implementasi perundang-undangan. *Kelima*, Easton juga menegaskan bahwa kajian atas sistem politik harus mempertimbangkan aneka pengaruh dari lingkungan. Bahwa kondisi psikologis

1 Elvi Juliansyah, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 39.

2 David Easton, *Empirical Conceptualizations: An Approach to the Analysis of Political System* (Boston: Holbrook Press, 1957).

3 David Easton, *The Political System* (New York: Alfred A. Knopf, Inc, 1967).

4 David Easton, *Analisa Sistem Politik*. dalam Mochtar Mas'od dan Colin Mac Andrew (Ed). *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982).

masyarakat, pola geografis wilayah negara, ataupun situasi yang berkembang pada level internasional harus diperhatikan pengaruhnya terhadap suatu sistem politik. Dengan kata lain, kajian atas sistem politik tidak boleh bersifat historis. *Keenam*, para peneliti sistem politik perlu membangun pemahaman bahwa sebuah sistem politik berlangsung di dalam suatu ketidakseimbangan (*disequilibrium*), karena justru di dalam ketidakseimbangan (*disequilibrium*) tersebut alur kerja sistem politik mempunyai daya dorong. Jika tidak ada persoalan ataupun kebutuhan, maka untuk apa sistem politik itu ada dan bekerja.

Selanjutnya, David Easton mengajukan suatu definisi tentang sistem politik yang terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut. *Pertama, the political system values (by means of politics)*. Artinya, sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijakan). *Kedua, its allocation are authoritative*. Artinya, penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan. *Ketiga, its authoritative allocations are binding on the society as a whole*. Artinya, penetapan yang bersifat paksaan akan mengikat masyarakat secara keseluruhan.⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa sistem politik memiliki beberapa unsur sebagai berikut. *Pertama*, pola yang tetap dari hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik berupa *supra struktur politik* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun *infra struktur politik* (partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik). *Kedua*, kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materiil dan immateriil untuk menjamin kesejahteraan. Dengan kata lain, membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat. *Ketiga*, penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. *Keempat*, fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar.

Maksudi dan Beddy Irawan menjelaskan hasil penganalisaan terhadap pemikiran Easton, bahwa sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam

masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.⁶

Dengan formulasi lain, sistem politik terdiri atas beberapa komponen. *Pertama*, subsistem masukan (*inputs*), yang terdiri dari tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan, dan sumber-sumber. *Kedua*, subsistem proses (*withinput*), yang mencakup proses mengubah masukan menjadi keluaran, atau juga proses konversi atau kotak hitam. *Ketiga*, subsistem keluaran (*output*), yakni hasil atau produk dari proses konversi yang berupa keputusan atau kebijakan. *Keempat*, subsistem lingkungan (*environment*), yaitu faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi sistem politik seperti sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis, dan seterusnya. *Kelima*, subsistem umpan balik (*feedback*), yaitu dampak dari pelaksanaan keputusan atau kebijakan, baik yang positif ataupun negatif, yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah sistem politik.

Dukungan (*support*) dan sumber daya (*resources*) dapat diberikan oleh pelbagai pihak, baik secara perseorangan atau kelompok guna menunjang tuntutan-tuntutan yang telah dibuat agar dapat diproses lebih lanjut. Tuntutan tanpa ditunjang oleh kuatnya dukungan dan sumber daya bisa mati sebelum diproses. Usaha mendorong masukan agar dapat masuk ke dalam sistem politik yang kemudian diproses menjadi keluaran juga sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan (*environment*).

Proses konversi (*conversion process*) dalam sistem politik yang terdiri dari *supra struktur politik* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan *infra struktur politik* (partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan, dan sebagainya) semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Proses yang terjadi dalam sistem politik itulah

6 Baca: Maksudi dan Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25.

5 Baca: Sukarna, *Sistem Politik* (Bandung: Alumnus, 1977), h. 16-17.

yang disebut sebagai proses konversi (*conversion process*), kotak hitam (*the black box*), dan *withinputs*.

Keluaran (*output*) atau hasil dari proses konversi itu berupa kebijakan publik (*public policy outputs*). Ini merupakan bentuk dari apa yang pemerintah ingin lakukan. Karenanya, kebijakan itu secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Artinya, bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu secara sah dapat dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh anggota masyarakat.

Konsekuensi-konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan yang merupakan hasil dari proses sebuah sistem politik bisa berupa dampak positif yang sesuai dengan harapan dari pembuat keputusan. Artinya, suatu kebijakan setelah ditetapkan ternyata dirasakan banyak kegunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga umumnya masyarakat dapat menerima atau mendukung terhadap kebijakan tersebut. Meskipun demikian, suatu kebijakan juga memiliki kemungkinan untuk membawa dampak negatif yang tidak diharapkan terjadi.

Umpan balik (*feedback*). Kebijakan baik yang berdampak positif maupun negatif, akan menjadi umpan balik yang akan dimanfaatkan oleh para perumus kebijakan politik sebagai masukan-masukan (*inputs*) baru yang selanjutnya akan diproses dalam sistem politik. Begitu seterusnya sehingga akan merupakan sebuah siklus, bermula dari masukan, lalu diproses, untuk kemudian menjadi keluaran, yang dampak kebijakannya akan menjadi umpan balik yang akan diserap sebagai masukan untuk proses berikutnya.

Lingkungan (*environment*) dari sebuah sistem politik berupa keadaan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, keamanan, geografi, dan sebagainya berpengaruh terhadap seluruh sub-sistem politik. Misalnya, sistem politik dipengaruhi sistem sosial, yaitu dalam masyarakat yang berkembang tata hidup yang paternalis, feodalis, aristokratis, dan otokratis, maka gerakan politik menuju sistem demokrasi akan mengalami hambatan-hambatan. Lain halnya dengan masyarakat yang berkembang tata hidup yang demokratis, maka akan menjadi

tempat yang subur untuk tumbuhnya sistem politik yang demokratis pula.

Sistem politik juga dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan/atau agama yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang agamanya mayoritas Hindu, terutama bagi yang masih memegang teguh tradisi kasta sebagai sebuah sistem sosial, maka sistem politik yang demokratis akan terhambat perkembangannya. Sementara dalam ajaran agama-agama lainnya, seperti Islam, Buddha, dan Kristen, yang tidak sistem kasta, maka sistem politik yang demokratis cenderung tidak memiliki hambatan karena dalam ajaran agama-agama tersebut tidak membagi masyarakat atas kelas-kelas takdir yang berbeda, walaupun ada perbedaan derajat biasanya disebabkan oleh usahanya masing-masing. Demikian halnya, penetapan pajak mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi mempengaruhi pola perilaku masyarakat secara umum, dan pada akhirnya mempengaruhi pula terhadap sistem politik itu sendiri. Dengan demikian, sistem sosial dan sistem ekonomi menjadi umpan balik bagi sistem demokrasi.

Pengaruh lingkungan, selain sebagai masukan-masukan (*inputs*), juga akan mendorong munculnya tuntutan-tuntutan yang secara langsung dapat ditransformasikan ke dalam sistem politik. Sebaliknya, karena pengaruh lingkungan pula berbagai tuntutan bisa mati (tidak berfungsi) sehingga tidak dapat diteruskan ke dalam sistem politik. Selain itu, pengaruh lingkungan pada proses konversi (*withinputs*) adalah ikut mewarnai kuantitas dan kualitas keluaran atau kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan bisa memperlancar atau menghambat proses konversi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keluaran (*outputs*) sistem politik tersebut.

Implementasi kebijakan-kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh sistem politik juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan, di mana hal ini bisa membentuk kualitas dampak kebijakan yang akan tampak kemudian. Dampak kebijakan, baik positif atau negatif, bisa menjadi umpan balik yang bisa dimanfaatkan sebagai

masuk-masukan baru yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan demikian, lingkungan mempunyai pengaruh yang luas sekali terhadap sistem politik. Tetapi sebaliknya, dalam kehidupan politik yang nyata, lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh sistem politik. Dalam konteks seperti ini terlihatlah pengaruh timbal balik antara lingkungan dan sistem politik.

2. Sistem Politik Pasca Reformasi

Pengalaman selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Menurut Nico Schulte Nordholt (dalam Juliansyah), kekuatan sistem politik memerlukan tingkat dukungan yang tinggi dari berbagai peran yang ada di dalam sistem politik itu sendiri.⁷ Kalau kita secara sepintas meninjau kelima persyaratan yang disebutkan oleh Linz dan Stepan, maka dengan sendirinya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi bangsa dan negara Indonesia masih jauh dari keadaan yang memadai. Lima syarat itu sangat penting bagi proses transisi menuju sistem demokrasi. *Pertama*, *civil society* yang bebas dan aktif. *Kedua*, masyarakat politik, termasuk elit parpol-parpol, yang relatif otonom. *Ketiga*, penegakan hukum. *Keempat*, birokrasi yang profesional. *Kelima*, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni.

Masyarakat sipil (*civil society*) diberikan ruang yang bebas dan aktif agar dapat memberikan peran politiknya guna menentukan arah perjalanan bangsa dan negara. Masyarakat sipil (*civil society*) mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan arah tindakan demi terciptanya masyarakat yang berdaya dalam menentukan nasibnya sendiri. Peran warga masyarakat tidak hanya tercermin melalui berbagai tindakan-tindakan politik, seperti

memberikan suara dalam Pemilu secara bebas dan bertanggung jawab, tetapi termasuk menentukan nasib sendiri. Dalam hubungan ini, peranan pemerintah menjadi katalisator bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang berdaya melalui berbagai program kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masyarakat tidak hanya pasif dan bersifat menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, masyarakat merupakan mitra pemerintah untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang adalah partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat tergantung pada *backing* seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Budaya *backing* tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik berikut kaum elit politik untuk bersikap otonom dalam menentukan proses kompetisi politik dan menentukan sikap politik. Kemandirian partai politik dan kaum elit politik sangat dibutuhkan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan sikap sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi kepentingan rezim yang berkuasa dengan kepentingan rakyat. Pengawasan dan pengendalian kekuasaan oleh oposisi menunjukkan berjalannya *check and balances system* dalam sistem politik. Jika ini tidak terjadi dikhawatirkan kegiatan extra parlemen untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah akan semakin marak.

⁷ Elvi Juliansyah, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 47.

Demokrasi yang sedang berjalan dengan baik harus didukung oleh kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) sehingga kaum elit politik dapat menjalankan hasil keputusan politik yang dibuat dalam sistem politik dengan baik. Keputusan yang dibuat untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu peran penegak hukum untuk menjalankan keputusan politik yang sudah dibuat menjadi sangat penting. Kesadaran yang terjadi adalah penegakan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku, jangan sampai hukum dijadikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Perangkat hukum yang dibuat dipastikan dapat dijalankan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan bersama. Walhasil penegakan hukum tidak berlaku diskriminatif, tetapi berdasarkan pada bukti dan fakta hukum.

Penegakan hukum diberlakukan sesuai dengan rasa keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai prinsip utama dalam menjalankan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan hidup masyarakat politik, karena itu politik memerlukan hukum untuk menciptakan rasa kepastian hukum, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, hukum dibuat dan dilaksanakan untuk menciptakan kepastian dan menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan terlindungi hak-haknya dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana untuk menciptakan keteraturan sosial.

Roda pemerintahan akan dapat berjalan bila kepentingan politik dipisahkan dengan kepentingan birokrasi. Birokrasi dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas politik atau kebijakan politik yang sudah dibuat. Peranan birokrasi dapat memberikan dukungan yang kuat bagi berjalannya roda pemerintahan. Tugas dan fungsi birokrasi dapat terlihat dengan jelas jika demokrasi terbuka lebar. Artinya, birokrasi tidak masuk dalam proses politik, melainkan lebih banyak pada pelaksana kebijakan politik. Persoalan pokok yang muncul adalah bagaimana meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya suatu sistem politik yang demokratis. Menurut Alfred Stepan, keputusan rezim memulai

reformasi menuju demokrasi biasanya terjadi karena didasari pertimbangan kelompok elit bahwa kepentingan jangka panjang mereka akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis. Tetapi jalur reformasi dari atas umumnya menghasilkan beberapa kecenderungan. *Pertama*, proses demokratisasi bisa saja dihentikan oleh pemegang kekuasaan karena situasi yang muncul pada masa liberalisasi itu dianggap terlalu mahal biayanya ketimbang biaya represi. *Kedua*, karena demokratisasi dari atas itu dikaitkan dengan pemeliharaan kepentingan elit, maka kecenderungan yang terjadi adalah munculnya demokrasi terbatas. *Ketiga*, kekuatan militer akan terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan hak-haknya dan hal ini sangat mengganggu proses demokratisasi.

Reformasi yang diharapkan oleh golongan mahasiswa dan masyarakat akan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, para pemegang kekuasaan harus berupaya mengontrol proses demokrasi yang sedang berjalan. Pertimbangan tersebut, dengan berbagai alasannya, tidak untuk membenarkan segala tindakan pemerintah (penguasa) hanya untuk mempertahankan kekuasaan, baik berupa alasan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan demokrasi, stabilitas politik dengan melakukan penyederhanaan partai politik, maupun melakukan eliminasi peran Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, tidaklah dapat dibenarkan jika pemegang kekuasaan semata-mata berorientasi untuk mempertahankan kekuasaan, terutama jika ditempuh melalui cara-cara yang kurang simpatik dan merugikan kepentingan rakyat. Pada era demokrasi, terdapat peran-peran lembaga lain yang merasa dirugikan akibat dibatasinya kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan politik, terutama aktivitas militer yang dirugikan melalui pembatasan ruang geraknya untuk memberikan pengaruh berbagai keputusan politik.

Kesiapan pemegang kekuasaan untuk merelakan sebagian kekuasaannya diawasi oleh pihak lain, dianggap terlalu mahal bagi pemegang kekuasaan. Pada akhirnya, tidak sedikit kaum elit politik yang memilih untuk melakukan tindakan represif. Sebenarnya pemegang kekuasaan

lebih mengetahui resiko yang diterimanya, saat tindakan represif terhadap pihak yang dianggap menentang kebijakannya. Demi untuk mempertahankan kelangsungan kekuasaannya, tidak jarang kaum elit politik memilih sikap dan tindakan yang terkesan demokratis untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, akibatnya terciptalah sebuah demokrasi semu. Demokrasi seperti itu dilakukan hanya untuk memberikan batas-batas ketertiban kelompok atau masyarakat yang seolah-olah terlibat dalam proses demokrasi. Tidak heran jika beberapa elit politik memberikan porsi-porsi tertentu kepada militer untuk menduduki tempat-tempat yang dianggap sangat strategis dari sisi politik dan ekonomi. Tindakan seperti itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan demokrasi semu, bukan demokrasi yang ideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Penutup

Pada bagian akhir artikel ini, penulis akan menggarisbawahi dua kenyataan penting sebagai berikut.

Pertama, sistem politik dipengaruhi oleh lingkungan yang berada di sekitarnya, baik yang langsung berhubungan dengan sistem politik maupun yang tidak langsung berhubungan dengan sistem politik. Tekanan terhadap sistem politik paling besar ditentukan oleh interaksi sistem politik dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Sistem politik bukan *bejana vakum* dalam ruang lingkup yang hampa, tetapi wadah yang dapat diisi dan bagaikan dinding berwarna putih. Sistem politik dengan mudah mendapat pengaruh dari lingkungan yang berada di sekitarnya. Lingkungan yang mempengaruhi sistem politik sangat terkait dengan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nilai inilah yang dapat memberikan warna, pola dan karakter sistem politik itu sendiri, baik yang dipengaruhi oleh nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai budaya yang dianut oleh suatu komunitas politik.

Kedua, proses politik internasional yang menjadi masukan bagi terciptanya perubahan sistem politik, telah menyeret bangsa dan negara

Indonesia untuk berpartisipasi dalam sistem politik global dengan terlibat di negara-negara Non-Blok. Keterbukaan dunia menyebabkan arus informasi semakin lancar masuk dalam suatu sistem politik yang ada. Banyak cara bagi masuknya berbagai informasi pada era sekarang ini, yang paling efektif adalah melalui internet dan media televisi internasional. Persitiwa yang sama pada saat ini dapat diketahui di seluruh dunia, membuat dunia semakin mengecil dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi seperti inilah menjadikan bangsa dan negara Indonesia terbawa pada fungsi *input* dari sistem politik dunia internasional yang juga mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

D. Daftar Pustaka

- Easton, David. (1957). *Empirical Conceptualizations: An Approach to the Analysis of Political System*, Boston: Holbrook Press.
- Easton, David. (1967). *The Political System*, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Easton, David. (1982). *Analisa Sistem Politik*, Dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew (Ed). *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press.
- Juliansyah, Elvi. (2013). *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Maksudi, Beddy Iriawan. (2013). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukarna. (1977). *Sistem Politik*, Bandung: Alumni.
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara.